

Kerangka Acuan Kegiatan

Peluncuran dan Sosialisasi Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak setiap warganya serta menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama serta terbebas dari perlakuan diskriminatif.¹ Meskipun telah ada jaminan hukum dalam konstitusi, saat ini di Indonesia terdapat beberapa kelompok yang masih mengalami hambatan dalam mengakses keadilan, kerap mengalami diskriminasi dan marginalisasi salah satunya adalah kelompok Penyandang Disabilitas. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 saat ini ada 14.2 persen penduduk Indonesia yang memiliki kondisi sebagai penyandang disabilitas di Indonesia atau sekitar 30.38 juta jiwa. Sementara itu WHO memperkirakan terdapat 15% perempuan, laki-laki dan anak-anak yang hidup dengan disabilitas di seluruh dunia.²

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/ CRPD*) melalui Undang-Undang (UU) No. 19 tahun 2011. Undang-undang ini menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui di muka hukum, dan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar kesamaan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan. Undang-undang ini mewajibkan negara untuk menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap bantuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kapasitas hukum mereka,³ menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan dan Aparat Penegak Hukum mengenai aksesibilitas difabel dan menjamin akses disabilitas pada keadilan termasuk ketika menjadi saksi dalam penyidikan, persidangan dan tahapan lain.⁴

Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menjamin pemenuhan akses keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas. Lebih lanjut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan sebagai peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini mengatur bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak dengan mengajukan permintaan penilaian personal kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya dan/atau psikolog atau psikiater.⁵ Selain itu, Pasal 12 ayat (3) PP 39/2020 juga mengamanatkan secara tegas pembentukan peraturan internal di tiap lembaga penegak hukum yang mengatur tentang pemberian akomodasi yang layak dalam rangka pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas.

Konsekuensi yang muncul dari peraturan tersebut adalah semua lembaga penegak hukum harus menyediakan peraturan untuk mendukung penyediaan akomodasi yang layak kepada penyandang disabilitas. Akan tetapi, pada praktiknya masih terdapat beberapa institusi pemerintah yang belum

¹ Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945

² WHO, World Report on Disability 2011, https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/

³ Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

⁴ Pasal 13 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

⁵ Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020

menyediakan hal tersebut, salah satunya dalam proses peradilan. Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai hambatan berganda ketika mengakses keadilan.

Dalam kerangka pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga telah merumuskan kebijakan pembangunan manusia yang harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang inklusif.⁶ Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas serta pembangunan masyarakat, lingkungan dan sarana prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu arah kebijakan dan strategi pembangunan Indonesia.⁷ Pemerintah juga saat ini sedang menyusun Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mencantumkan mengenai penguatan regulasi dan kebijakan, meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar, menguatnya sistem pengaduan, pelayanan dan penanganan Penyandang disabilitas.

Selain itu Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (*Open Government Indonesia/ RAN OGI*) 2020-2022 juga mengamanatkan adanya peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas di setiap tahapan acara peradilan, di mana lembaga yang menjadi penanggung jawab diantaranya adalah Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian RI. Rencana ini didasarkan pada temuan bahwa seringkali kebutuhan psikososial dari Penyandang Disabilitas tidak mendapatkan asesmen yang layak, tidak adanya identifikasi kebutuhan dan pemenuhan keadilan menjadi terhambat. Sehingga perlu adanya peraturan pelaksana untuk asesmen kebutuhan penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020. Penyusunan asesmen ini diharapkan menjadi rujukan bagi Aparat Penegak Hukum untuk menilai kebutuhan korban, sehingga korban mendapatkan pemenuhan kebutuhan hukumnya.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kejaksaan RI selaku lembaga penegak hukum yang memiliki peran dan posisi kunci dalam penanganan perkara untuk menyusun suatu kebijakan terkait penanganan perkara bagi Penyandang Disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, Jaksa Agung Republik Indonesia melalui Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan RI atas dukungan AIPJ2 (Australia Indonesia Partnership for Justice 2) telah mengesahkan **“Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan”** sebagai komitmen dalam penguatan akses terhadap keadilan bagi Penyandang Disabilitas.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan peluncuran ini dilakukan untuk mendiseminasikan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang telah disahkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan akses terhadap keadilan bagi Penyandang Disabilitas.

⁶ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

⁷ Kementerian PPN/ Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, versi 14 Agustus 2019, hal. 108

⁸ Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia 2020-2022.

C. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023
Pukul : 09.00 - 12.00 WIB
Tempat : Hotel ... (tentatif)
Link Zoom : <https://bit.ly/Peluncuran-Pedoman-Disabilitas-Kejaksanaan>

D. Agenda

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Adhyaksa 2. Keynote Speech dari Jampidum (Dr. Fadil Zumhana) 3. Sambutan DFAT 4. Sambutan dari AIPJ2 (Craig Ewers)	09.00 - 09.30 WIB
2.	Pemaparan Pedoman No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan: Ibu Erni Mustikasari (Jaksa Ahli Madya pada Kejaksaan Agung – Sekretaris Pokja Akses Keadilan Kejaksaan RI)	09.30 - 09.45 WIB
3	Penanggap 1: Komisi Nasional Disabilitas	09.45 - 10.00
3.	Penanggap 2: Biro Perencanaan Kejaksaan RI	10.00 - 10.15
4.	Penanggap 3: IJRS	10.15 - 10.30
5.	Penanggap 4: SIGAB	10.30 - 10.45
7.	Tanya jawab:	10.45 - 11.30
8.	Penutup	11.30 - 11.45

E. Undangan

- **Peserta *Offline/Luring***
Kejaksanaan
 1. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (2 orang)
 2. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (2 orang)
 3. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2 orang)

4. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (2 orang)
5. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (2 orang)
6. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (2 orang)
7. Kejaksaan Negeri Depok (2 orang)
8. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi (2 orang)
9. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang (2 orang)
10. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan (2 orang)

Kementerian / Lembaga Negara

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung
2. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri
3. Komisi Nasional Disabilitas
4. Komnas Perempuan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

DFAT / AIPJ2

1. DFAT
2. Craig Ewers
3. Herni Sri Nur Bayanti
4. Derosya
5. Muhammad Hafiz

● **Peserta *Online/Daring***

Kejaksaan Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam

1. Kejaksaan Tinggi Nanggroe Aceh Darussalam
2. Kejaksaan Negeri Banda Aceh
3. Kejaksaan Negeri Sabang
4. Kejaksaan Negeri Sigli
5. Kejaksaan Negeri Langsa
6. Kejaksaan Negeri Takengon
7. Kejaksaan Negeri Meulaboh
8. Kejaksaan Negeri Tapaktuan
9. Kejaksaan Negeri Kutacane
10. Kejaksaan Negeri Bireuen
11. Kejaksaan Negeri Lhoksukon
12. Kejaksaan Negeri IDI
13. Kejaksaan Negeri Kuala Simpang
14. Kejaksaan Negeri Sinabang
15. Kejaksaan Negeri Calang
16. Kejaksaan Negeri Singkel
17. Kejaksaan Negeri Blangkejeren
18. Kejaksaan Negeri Janthoi
19. Kejaksaan Negeri Blangpidie
20. Kejaksaan Negeri Suka Makmue

21. Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong

Kejaksaan Wilayah Sumatera Utara

22. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
23. Kejaksaan Negeri Medan
24. Kejaksaan Negeri Binjai
25. Kejaksaan Negeri Pematang Siantar
26. Kejaksaan Negeri Sibolga
27. Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam
28. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi
29. Kejaksaan Negeri Tanjung Balai
30. Kejaksaan Negeri Rantau Prapat
31. Kejaksaan Negeri Kabanjahe
32. Kejaksaan Negeri Sidikalang
33. Kejaksaan Negeri Tarutung
34. Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan
35. Kejaksaan Negeri Gunungsitoli
36. Kejaksaan Negeri Kisaran
37. Kejaksaan Negeri Siantar
38. Kejaksaan Negeri Stabat
39. Kejaksaan Negeri Belawan
40. Kejaksaan Negeri Balige
41. Kejaksaan Negeri Panyabungan
42. Kejaksaan Negeri Sei Rampah

Kejaksaan Wilayah Sumatera Barat

43. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
44. Kejaksaan Negeri Padang
45. Kejaksaan Negeri Bukittinggi
46. Kejaksaan Negeri Payakumbuh
47. Kejaksaan Negeri Pariaman
48. Kejaksaan Negeri Sawahlunto
49. Kejaksaan Negeri Solok
50. Kejaksaan Negeri Padang Panjang
51. Kejaksaan Negeri Batusangkar
52. Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping
53. Kejaksaan Negeri Painan
54. Kejaksaan Negeri Sijunjung
55. Kejaksaan Negeri Lubuk Basung
56. Kejaksaan Negeri Tua Pejat
57. Kejaksaan Negeri Simpang Empat
58. Kejaksaan Negeri Pulau Punjung
59. Kejaksaan Negeri Padang Aro

Kejaksaan Wilayah Riau

60. Kejaksaan Tinggi Riau
61. Kejaksaan Negeri Pekanbaru
62. Kejaksaan Negeri Rengat
63. Kejaksaan Negeri Dumai
64. Kejaksaan Negeri Bengkalis
65. Kejaksaan Negeri Tembilahan
66. Kejaksaan Negeri Bangkinang
67. Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian
68. Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura
69. Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan
70. Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci
71. Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung

Kejaksaan Wilayah Jambi

72. Kejaksaan Tinggi Jambi
73. Kejaksaan Negeri Jambi
74. Kejaksaan Negeri Muara Bulian
75. Kejaksaan Negeri Muara Bungo
76. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
77. Kejaksaan Negeri Bangko
78. Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal
79. Kejaksaan Negeri Sarolangun
80. Kejaksaan Negeri Muara Tebo
81. Kejaksaan Negeri Muara Sabak
82. Kejaksaan Negeri Sengeti

Kejaksaan Wilayah Sumatera Selatan

83. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
84. Kejaksaan Negeri Palembang
85. Kejaksaan Negeri Kayu Agung
86. Kejaksaan Negeri Baturaja
87. Kejaksaan Negeri Lahat
88. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
89. Kejaksaan Negeri Muara Enim
90. Kejaksaan Negeri Sekayu
91. Kejaksaan Negeri Prabumulih
92. Kejaksaan Negeri Pagar Alam
93. Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai

Kejaksaan Wilayah Bengkulu

94. Kejaksaan Tinggi Bengkulu
95. Kejaksaan Negeri Bengkulu
96. Kejaksaan Negeri Curup
97. Kejaksaan Negeri Arga Makmur
98. Kejaksaan Negeri Manna

99. Kejaksaan Negeri Mukomuko
100. Kejaksaan Negeri Tais
101. Kejaksaan Negeri Bintuhan
102. Kejaksaan Negeri Tubei
103. Kejaksaan Negeri Kepahiang

Kejaksaan Wilayah Lampung

104. Kejaksaan Tinggi Lampung
105. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
106. Kejaksaan Negeri Kalianda
107. Kejaksaan Negeri Metro
108. Kejaksaan Negeri Kotabumi
109. Kejaksaan Negeri Liwa
110. Kejaksaan Negeri Gunung Sugih
111. Kejaksaan Negeri Sukadana
112. Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu
113. Kejaksaan Negeri Menggala
114. Kejaksaan Negeri Kota Agung

Kejaksaan Wilayah Jawa Barat

115. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
116. Kejaksaan Negeri Bandung
117. Kejaksaan Negeri Cirebon
118. Kejaksaan Negeri Bogor
119. Kejaksaan Negeri Sukabumi
120. Kejaksaan Negeri Purwakarta
121. Kejaksaan Negeri Garut
122. Kejaksaan Negeri Tasikmalaya
123. Kejaksaan Negeri Cibinong
124. Kejaksaan Negeri Cimahi/Bale Bandung
125. Kejaksaan Negeri Indramayu
126. Kejaksaan Negeri Sumedang
127. Kejaksaan Negeri Kuningan
128. Kejaksaan Negeri Majalengka
129. Kejaksaan Negeri Ciamis
130. Kejaksaan Negeri Subang
131. Kejaksaan Negeri Sumber
132. Kejaksaan Negeri Cibadak
133. Kejaksaan Negeri Cikarang
134. Kejaksaan Negeri Banjar
135. Kejaksaan Negeri Singaparna

Kejaksaan Wilayah Jawa Tengah

136. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

137. Kejaksaan Negeri Semarang
138. Kejaksaan Negeri Surakarta
139. Kejaksaan Negeri Pekalongan
140. Kejaksaan Negeri Magelang
141. Kejaksaan Negeri Purwokerto
142. Kejaksaan Negeri Tegal
143. Kejaksaan Negeri Pati
144. Kejaksaan Negeri Cilacap
145. Kejaksaan Negeri Kudus
146. Kejaksaan Negeri Klaten
147. Kejaksaan Negeri Salatiga
148. Kejaksaan Negeri Rembang
149. Kejaksaan Negeri Pemalang
150. Kejaksaan Negeri Purbalingga
151. Kejaksaan Negeri Purworejo
152. Kejaksaan Negeri Kebumen
153. Kejaksaan Negeri Sragen
154. Kejaksaan Negeri Kendal
155. Kejaksaan Negeri Blora
156. Kejaksaan Negeri Boyolali
157. Kejaksaan Negeri Brebes
158. Kejaksaan Negeri Demak
159. Kejaksaan Negeri Jepara
160. Kejaksaan Negeri Karanganyar
161. Kejaksaan Negeri Sukoharjo
162. Kejaksaan Negeri Wonogiri
163. Kejaksaan Negeri Banjarnegara
164. Kejaksaan Negeri Temanggung
165. Kejaksaan Negeri Wonosobo
166. Kejaksaan Negeri Banyumas
167. Kejaksaan Negeri Batang
168. Kejaksaan Negeri Purwodadi
169. Kejaksaan Negeri Ambarawa
170. Kejaksaan Negeri Slawi
171. Kejaksaan Negeri Mungkid
172. Kejaksaan Negeri Kajen

Kejaksaan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

173. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
174. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
175. Kejaksaan Negeri Sleman
176. Kejaksaan Negeri Wonosari
177. Kejaksaan Negeri Wates
178. Kejaksaan Negeri Bantul

Kejaksaan Wilayah Jawa Timur

179. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
180. Kejaksaan Negeri Surabaya
181. Kejaksaan Negeri Malang
182. Kejaksaan Negeri Jember
183. Kejaksaan Negeri Kediri
184. Kejaksaan Negeri Madiun
185. Kejaksaan Negeri Pasuruan
186. Kejaksaan Negeri Bojonegoro
187. Kejaksaan Negeri Bondowoso
188. Kejaksaan Negeri Pamekasan
189. Kejaksaan Negeri Sidoarjo
190. Kejaksaan Negeri Kepanjen
191. Kejaksaan Negeri Banyuwangi
192. Kejaksaan Negeri Blitar
193. Kejaksaan Negeri Mojokerto
194. Kejaksaan Negeri Probolinggo
195. Kejaksaan Negeri Jombang
196. Kejaksaan Negeri Ponorogo
197. Kejaksaan Negeri Gresik
198. Kejaksaan Negeri Lumajang
199. Kejaksaan Negeri Tulungagung
200. Kejaksaan Negeri Trenggalek
201. Kejaksaan Negeri Nganjuk
202. Kejaksaan Negeri Magetan
203. Kejaksaan Negeri Tuban
204. Kejaksaan Negeri Ngawi
205. Kejaksaan Negeri Sumenep
206. Kejaksaan Negeri Lamongan
207. Kejaksaan Negeri Sampang
208. Kejaksaan Negeri Bangkalan
209. Kejaksaan Negeri Pacitan
210. Kejaksaan Negeri Situbondo
211. Kejaksaan Negeri Bangil
212. Kejaksaan Negeri Kraksaan
213. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
214. Kejaksaan Negeri Batu
215. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri

Kejaksaan Wilayah Kalimantan Barat

216. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
217. Kejaksaan Negeri Pontianak
218. Kejaksaan Negeri Singkawang
219. Kejaksaan Negeri Sintang
220. Kejaksaan Negeri Ketapang
221. Kejaksaan Negeri Sanggau
222. Kejaksaan Negeri Mempawah

223. Kejaksaan Negeri Putussibau
224. Kejaksaan Negeri Sambas
225. Kejaksaan Negeri Bengkayang
226. Kejaksaan Negeri Ngabang
227. Kejaksaan Negeri Sekadau

Kejaksaan Wilayah Kalimantan Tengah

228. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
229. Kejaksaan Negeri Palangkaraya
230. Kejaksaan Negeri Sampit
231. Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas
232. Kejaksaan Negeri Muara Teweh
233. Kejaksaan Negeri Pangkalanbun
234. Kejaksaan Negeri Buntok
235. Kejaksaan Negeri Puruk Cahu
236. Kejaksaan Negeri Tamiang Layang
237. Kejaksaan Negeri Kasongan
238. Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang
239. Kejaksaan Negeri Sukamara
240. Kejaksaan Negeri Nanga Bulik
241. Kejaksaan Negeri Kuala Kurun
242. Kejaksaan Negeri Pulang Pisau

Kejaksaan Wilayah Kalimantan Selatan

243. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
244. Kejaksaan Negeri Banjarmasin
245. Kejaksaan Negeri Kandangan
246. Kejaksaan Negeri Kotabaru
247. Kejaksaan Negeri Martapura
248. Kejaksaan Negeri Amuntai
249. Kejaksaan Negeri Barabai
250. Kejaksaan Negeri Tanjung
251. Kejaksaan Negeri Rantau
252. Kejaksaan Negeri Pleihari
253. Kejaksaan Negeri Marabahan
254. Kejaksaan Negeri Banjarbaru
255. Kejaksaan Negeri Batulicin
256. Kejaksaan Negeri Paringin

Kejaksaan Wilayah Kalimantan Timur

257. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
258. Kejaksaan Negeri Balikpapan
259. Kejaksaan Negeri Samarinda
260. Kejaksaan Negeri Tenggara
261. Kejaksaan Negeri Tanah Grogot

262. Kejaksaan Negeri Tanjung Redep
263. Kejaksaan Negeri Tarakan
264. Kejaksaan Negeri Nunukan
265. Kejaksaan Negeri Bontang
266. Kejaksaan Negeri Tanjung Selor
267. Kejaksaan Negeri Sendawar
268. Kejaksaan Negeri Sangatta
269. Kejaksaan Negeri Malinau
270. Kejaksaan Negeri Penajam

Kejaksaan Wilayah Sulawesi Utara

271. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
272. Kejaksaan Negeri Manado
273. Kejaksaan Negeri Tondano
274. Kejaksaan Negeri Kotamobagu
275. Kejaksaan Negeri Tahuna
276. Kejaksaan Negeri Bitung
277. Kejaksaan Negeri Tomohon
278. Kejaksaan Negeri Amurang
279. Kejaksaan Negeri Melonguane
280. Kejaksaan Negeri Airmadidi

Kejaksaan Wilayah Sulawesi Tengah

281. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
282. Kejaksaan Negeri Palu
283. Kejaksaan Negeri Luwuk
284. Kejaksaan Negeri Toli-toli
285. Kejaksaan Negeri Poso
286. Kejaksaan Negeri Donggala
287. Kejaksaan Negeri Banggai
288. Kejaksaan Negeri Parigi
289. Kejaksaan Negeri Buol

Kejaksaan Wilayah Sulawesi Tenggara

290. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
291. Kejaksaan Negeri Kendari
292. Kejaksaan Negeri Bau-Bau
293. Kejaksaan Negeri Kolaka
294. Kejaksaan Negeri Raha
295. Kejaksaan Negeri Unaaha
296. Kejaksaan Negeri Wangi-wangi
297. Kejaksaan Negeri Lasusua
298. Kejaksaan Negeri Andoolo
299. Kejaksaan Negeri Pasarwajo

Kejaksaan Wilayah Sulawesi Selatan

300. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
301. Kejaksaan Negeri Makassar
302. Kejaksaan Negeri Pare-pare
303. Kejaksaan Negeri Palopo
304. Kejaksaan Negeri Sungguminasa
305. Kejaksaan Negeri Watampone/Bone
306. Kejaksaan Negeri Mamuju
307. Kejaksaan Negeri Maros
308. Kejaksaan Negeri Bantaeng
309. Kejaksaan Negeri Pinrang
310. Kejaksaan Negeri Sengkang
311. Kejaksaan Negeri Soppeng
312. Kejaksaan Negeri Barru
313. Kejaksaan Negeri Bulukumba
314. Kejaksaan Negeri Jeneponto
315. Kejaksaan Negeri Enrekang
316. Kejaksaan Negeri Majene
317. Kejaksaan Negeri Makale
318. Kejaksaan Negeri Pangkajene
319. Kejaksaan Negeri Selayar
320. Kejaksaan Negeri Polewali
321. Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang
322. Kejaksaan Negeri Sinjai
323. Kejaksaan Negeri Takalar
324. Kejaksaan Negeri Masamba
325. Kejaksaan Negeri Mamasa
326. Kejaksaan Negeri Belopa
327. Kejaksaan Negeri Malili
328. Kejaksaan Negeri Pasangkayu

Kejaksaan Wilayah Bali

329. Kejaksaan Tinggi Bali
330. Kejaksaan Negeri Denpasar
331. Kejaksaan Negeri Singaraja
332. Kejaksaan Negeri Klungkung
333. Kejaksaan Negeri Bangli
334. Kejaksaan Negeri Amlapura
335. Kejaksaan Negeri Gianyar
336. Kejaksaan Negeri Negara
337. Kejaksaan Negeri Tabanan

Kejaksaan Wilayah Nusa Tenggara Barat

338. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
339. Kejaksaan Negeri Mataram

340. Kejaksaan Negeri Praya
341. Kejaksaan Negeri Selong
342. Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar
343. Kejaksaan Negeri Raba
344. Kejaksaan Negeri Dompu

Kejaksaan Wilayah Nusa Tenggara Timur

345. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
346. Kejaksaan Negeri Kupang
347. Kejaksaan Negeri Soe
348. Kejaksaan Negeri Kefamenanu
349. Kejaksaan Negeri Atambua
350. Kejaksaan Negeri Ende
351. Kejaksaan Negeri Maumere
352. Kejaksaan Negeri Larantuka
353. Kejaksaan Negeri Ruteng
354. Kejaksaan Negeri Bajawa
355. Kejaksaan Negeri Waingapu
356. Kejaksaan Negeri Waikabubak
357. Kejaksaan Negeri Kalabahi
358. Kejaksaan Negeri Lewoleba
359. Kejaksaan Negeri Rote Ndao
360. Kejaksaan Negeri Labuan Bajo
361. Kejaksaan Negeri Oelamasi

Kejaksaan Wilayah Maluku

362. Kejaksaan Tinggi Maluku
363. Kejaksaan Negeri Ambon
364. Kejaksaan Negeri Masohi
365. Kejaksaan Negeri Tuai
366. Kejaksaan Negeri Saumlaki
367. Kejaksaan Negeri Namlea
368. Kejaksaan Negeri Dobo

Kejaksaan Wilayah Papua

369. Kejaksaan Tinggi Papua
370. Kejaksaan Negeri Jayapura
371. Kejaksaan Negeri Biak
372. Kejaksaan Negeri Manokwari
373. Kejaksaan Negeri Sorong
374. Kejaksaan Negeri Fak-fak
375. Kejaksaan Negeri Merauke
376. Kejaksaan Negeri Wamena
377. Kejaksaan Negeri Nabire
378. Kejaksaan Negeri Serui

379. Kejaksaan Negeri Timika

Kejaksaan Wilayah Maluku Utara

- 380. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
- 381. Kejaksaan Negeri Ternate
- 382. Kejaksaan Negeri Soasio
- 383. Kejaksaan Negeri Tobelo
- 384. Kejaksaan Negeri Labuha
- 385. Kejaksaan Negeri Sanana
- 386. Kejaksaan Negeri Weda

Kejaksaan Wilayah Banten

- 387. Kejaksaan Tinggi Banten
- 388. Kejaksaan Negeri Serang
- 389. Kejaksaan Negeri Tangerang
- 390. Kejaksaan Negeri Tigaraksa
- 391. Kejaksaan Negeri Pandeglang
- 392. Kejaksaan Negeri Rangkasbitung
- 393. Kejaksaan Negeri Cilegon

Kejaksaan Wilayah Kepulauan Bangka Belitung

- 394. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung
- 395. Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang
- 396. Kejaksaan Negeri Sungailiat
- 397. Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan
- 398. Kejaksaan Negeri Mentok
- 399. Kejaksaan Negeri Manggar

Kejaksaan Wilayah Gorontalo

- 400. Kejaksaan Tinggi Gorontalo
- 401. Kejaksaan Negeri Limboto
- 402. Kejaksaan Negeri Gorontalo
- 403. Kejaksaan Negeri Tilamuta
- 404. Kejaksaan Negeri Suwawa
- 405. Kejaksaan Negeri Marisa

Kejaksaan Wilayah Kepulauan Riau

- 406. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
- 407. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang
- 408. Kejaksaan Negeri Batam
- 409. Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun
- 410. Kejaksaan Negeri Ranai
- 411. Kejaksaan Negeri Daik Lingga

F. LAMPIRAN

Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dapat diakses di: <https://bit.ly/Pedoman-2-2023-Disabilitas>